

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan peningkatan teknologi informasi yang berkembang semakin pesat telah mendorong perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antar negara. Saat ini, dunia berada dalam fase di mana kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan negara untuk beradaptasi dan berinovasi pada sektor digital.

Perkembangan teknologi komunikasi digital selama dua dekade terakhir telah menyebabkan perubahan dalam cara berbagai pihak internasional berinteraksi, termasuk dalam cara mereka melakukan diplomasi. Fenomena ini juga mendorong munculnya pembahasan tentang diplomasi digital, seperti yang dijelaskan oleh Bjola dan Zaiotti (2021) dalam bukunya *Digital Diplomacy and International Organisations*. Mereka menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital oleh para pelaku dalam hubungan internasional kini bukan hanya sebagai alat bantu komunikasi, tetapi sudah menjadi sarana aktif untuk membangun keterlibatan, memperluas cakupan, serta membangun hubungan lintas batas dengan berbagai pihak di luar negeri. (Cornelio Bjola, 2022)

Perubahan ini memunculkan konsep baru dalam dunia hubungan internasional, yaitu Diplomasi Digital. Diplomasi Digital adalah strategi yang mengandalkan teknologi dan platform digital untuk mewujudkan kepentingan

nasional dengan cara yang lebih cepat dan efektif. Pemerintah Indonesia mengembangkan pelaksanaan diplomasi digital semakin pentingnya pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini. Dalam hal ini, pemerintah mengintegrasikan ekonomi baru yang berbasis digital dalam melakukan inovasi sebagai instrumen diplomasi arah baru. (R. A. Putri et al., 2024)

Dalam hal ekonomi, aliran barang, jasa, dan orang lintas batas semakin meningkat dan menjadi lebih rumit. Aktivitas perdagangan serta pariwisata membutuhkan sistem pembayaran yang lebih aman, cepat, dan hemat biaya. Namun, sistem pembayaran tradisional yang mengandalkan transfer bank atau menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat sering kali menyebabkan permasalahan. Misalnya, biaya konversi mata uang yang tinggi, risiko perubahan nilai tukar, serta waktu penyelesaian transaksi yang lama. Kondisi ini menjadi hambatan utama, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang ingin memperluas pasar mereka.

Dengan meningkatnya penggunaan pembayaran digital dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi finansial yang signifikan. Di Indonesia, *e-wallet* saat ini merupakan metode pembayaran digital yang paling umum, dengan 80 persen dari responden menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh populasi yang lebih muda dan peningkatan akses internet mobile. Dalam transaksi sehari-hari, platform pembayaran digital seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay telah menjadi pilihan utama masyarakat. Transaksi menggunakan *e-wallet* dan perangkat seluler sebagian besar, dengan pengguna di kota menggunakan lebih dari 60% dari transaksi

mereka setiap hari. Pertumbuhan ini didukung oleh infrastruktur teknologi yang semakin maju. Pada Januari 2025, koneksi mobile di Indonesia mencapai 125 persen dari populasi, memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dompet digital. (Research, 2025) Di Indonesia, sistem pembayaran digital dipermudah melalui QR Code yang diluncurkan oleh bank Indonesia dengan nama Quick Response Indonesian Standard atau yang biasa dikenal dengan sebutan QRIS. Tujuan diciptakannya QRIS adalah untuk memudahkan pengguna dompet digital untuk melakukan transaksi hanya melalui satu kode QR dari berbagai platform dompet digital. QRIS pertama kali diluncurkan pada tahun 2019. Tepatnya pada tanggal 17 agustus sejak pertama kali QRIS resmi digunakan secara nasional. (*Apa Itu QRIS? Sejarah, Jenis, Dan Manfaatnya*, n.d.)

Penerapan Aturan Standar Nasional QRIS untuk pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. 9 Regulasi yang tercakup dalam hal ini menurut (M. Putri, 2025) antara lain:

a) Standarisasi QRIS untuk transaksi lintas negara agar kompatibel dengan sistem pembayaran di negara lain.

b) Interkoneksi pembayaran antara Indonesia dan negara mitra seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

c) Keamanan dan perlindungan konsumen, memastikan transaksi QRIS tetap aman dan efisien.

d) Kewajiban penyedia jasa pembayaran (PJSP) untuk mematuhi standar QRIS dalam transaksi internasional.

Dalam Konteks Diplomasi Ekonomi digital, pembayaran digital lintas batas menjadi inovasi baru untuk meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, seperti negara negara ASEAN terkhusus Malaysia dan Singapura yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Memanfaatkan teknologi dalam transaksi jual beli lintas batas dapat menjadi jembatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain.

Tujuan dari diplomasi ini adalah untuk membuat ekosistem ekonomi yang dapat bersaing di tingkat global. Salah satu upaya utamanya adalah memperkuat kekuatan digital serta membangun sistem pembayaran nasional yang mandiri. Fokus utamanya adalah membantu pengusaha kecil dan menengah (UMKM) lokal agar dapat lebih dikenal dan diminati oleh wisatawan internasional, serta meningkatkan ekonomi lokal dari sektor pariwisata secara lebih efektif.

Salah satu bentuk nyata dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah inisiatif *Cross Border Payment Connectivity* yang dimulai oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini termasuk dalam upaya regional untuk menghubungkan sistem pembayaran antar negara di kawasan ASEAN, terutama melalui skema pembayaran

berbasis QR Code, yang di Indonesia disebut QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Antarnegara. Skema ini memungkinkan transaksi lintas batas langsung menggunakan mata uang lokal, tanpa harus mengkonversi menjadi mata uang negara tujuan sehingga mengurangi risiko perubahan nilai tukar dan biaya transaksi. Adapun aturan dasar penggunaan *QRIS Cross Border* dimulai oleh pengguna yang memindai kode QR yang tersedia pada merchant. Lalu pengguna dapat melakukan transaksi langsung dengan e wallet dan akan langsung terkonversi otomatis ke mata uang negara tujuan.

Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS menunjukkan dimensi strategis yang lebih luas, melebihi hanya sebagai alat bantu transaksi biasa. QRIS memiliki dua peran, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan inklusi sosial dan keuangan, serta menjadi sarana diplomasi ekonomi dan memperkuat citra nasional Indonesia di tingkat regional. Hal ini juga dilakukan melalui pengembangan skema pembayaran dengan mata uang lokal, sebagai upaya memperkuat kedaulatan digital dalam transaksi antar negara, terutama di tengah dominasi mata uang asing. (Harik & Sahide, 2025)

Awal mula Sejarah *Cross Border Payment* Adalah ketika Bank Indonesia bekerja sama dengan *Bank of Thailand* (BOT) untuk mengembangkan koneksi pembayaran QR kode lintas negara, QRIS mulai berkembang. Pada 17 Agustus 2021, Bank Indonesia dan *Bank of Thailand* mengumumkan pilot program lintas negara pertama di ASEAN yang memungkinkan transaksi pembayaran QR antara kedua negara. 13 penyedia QRIS, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Banker Thailand, dan operator switching Indonesia seperti Rintis,

Artajasa, Jalin, dan Alto (RAJA) serta operator sistem pembayaran Thailand National ITMX terlibat dalam inisiatif ini. Mekanisme kerja sistem ini memungkinkan pengguna Indonesia untuk scan kode QR Thailand menggunakan aplikasi pembayaran mobile Indonesia mereka, dan pengguna Thailand dapat melakukan transaksi di Indonesia menggunakan aplikasi e wallet mereka. Transaksi dilakukan dengan quote mata uang langsung yang disediakan oleh bank yang ditunjuk sebagai dealer mata uang cross (ACCD) di bawah kerangka lokal mata uang penyelesaian (LCS). Kerangka ini memungkinkan konversi mata uang secara otomatis dengan kurs yang kompetitif tanpa menggunakan perantara. (Yogatama, 2021)

Setelah kerjasama bilateral antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand berhasil mendapat respon positif, QRIS mulai berkembang ke beberapa negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia dan Singapura. Ekspansi QRIS *Cross Border* ke Malaysia resmi diluncurkan pada tanggal 8 Mei 2023. Bank Indonesia resmi bekerja sama dengan bank Negara Malaysia terkait pembayaran lintas batas untuk memudahkan pengguna dari kedua negara untuk melakukan pembayaran ritel dengan mudah dan cepat hanya dengan memindai QR code yang ada pada *merchant*. (Timur, n.d.) Tak butuh waktu lama, Bank Indonesia Kembali melakukan ekspansi QRIS ke negara lain yaitu ke Singapura dengan bekerja sama dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) tepatnya pada tanggal 17 November 2023 menurut website resmi ASPI Indonesia.

Perluasan QRIS sebagai alat diplomasi ekonomi digital tidak terlepas dari aspek kedaulatan digital, yang menjadi salah satu pertimbangan strategis dalam

penyusunan kebijakan oleh Indonesia. QRIS diciptakan sebagai bentuk nyata dari kedaulatan digital Indonesia. Tujuannya adalah mengalihkan proses pengalihan transaksi dalam negeri ke dalam negeri melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard. Sebelumnya, jaringan tersebut membebankan biaya yang tinggi dan menyimpan data transaksi di luar negeri. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur alur data dan infrastruktur digitalnya sendiri agar tetap aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi dasar bagi Indonesia untuk meningkatkan pengaruhnya dalam sistem pembayaran digital global, terutama melalui skema pembayaran lintas negara seperti QRIS Cross Border. (Yani, 2025)

Perluasan kerja sama ini turut didorong oleh skema penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS), yang memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan tanpa harus melalui dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara. (Bimantara & Nugraha, 2025)

Beberapa artikel berita telah mengangkat isu terkait QRIS *Cross Border Payment*, Adapun beberapa artikel tersebut adalah sebagai berikut. Bank Indonesia telah melakukan uji coba QR QRIS *Cross Border* bersama Malaysia dan Thailand, yang memungkinkan pengguna dari kedua negara melakukan transaksi menggunakan kode QR. QRIS Cross Border memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi dalam transaksi, mendukung proses digitalisasi perdagangan, serta membantu menjaga stabilitas ekonomi makro dengan

memperluas penggunaan metode pembayaran berbasis mata uang lokal. (*QRIS Cross-Border Solusi Transaksi Antar Negara*, n.d.)

Kantor perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kepulauan Riau melaporkan penggunaan transaksi lintas negara oleh wisatawan asal Malaysia menembus 5.000 transaksi, jauh melampaui jumlah transaksi dari wisatawan Singapura yang mencapai 1.252 transaksi pada periode yang sama. (*Warga Malaysia Gemar Bayar Pakai QRIS Di Kepri, Nilai Transaksinya Capai Rp 15,29 Miliar – Marwah Kepri*, n.d.)

Artikel ini menjelaskan bagaimana sembilan negara tersebut tersebar, cara kerja skema teknisnya, siapa yang mendapat manfaat, hingga tantangan-tantangan yang harus diatasi agar pengalaman "scan & bayar" antar negara semakin lancar. Sembilan pasar yang sudah atau sedang memungkinkan pembayaran menggunakan QR Indonesia, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan. Daftar ini juga sesuai dengan arah kebijakan tentang keterhubungan pembayaran QR di Asia yang didukung oleh otoritas regional. (*Ekspansi QRIS Lintas Negara, Sebaran Dalam 9 Negara per Agustus 2025*, n.d.)

Penerapan *Cross-Border Payment* melalui QRIS bukan sekadar isu teknis, melainkan langkah strategis yang berperan sebagai instrumen Diplomasi Ekonomi Digital. Kesuksesan QRIS Antarnegara menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam inovasi keuangan digital di Asia Tenggara, memberikan kontribusi besar dalam pembentukan standar pembayaran regional. Integrasi sistem ini tidak hanya

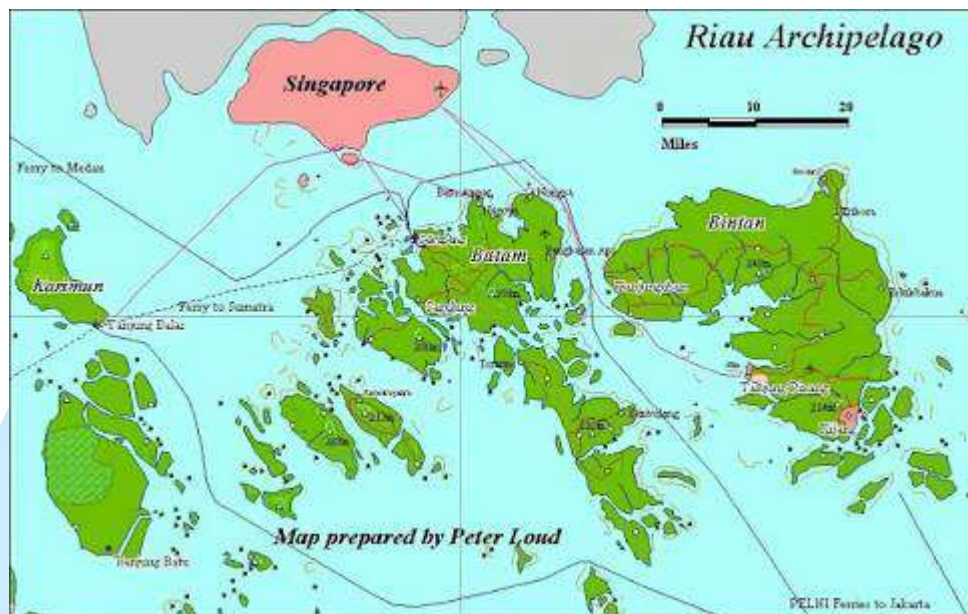
mempererat koneksi keuangan, tetapi juga menopang stabilitas ekonomi regional serta hubungan antarnegara yang lebih kuat. Tak hanya itu, keberhasilan inisiatif QRIS *Cross Border Payment* dapat menjadikan image Indonesia semakin baik dimata Internasional yang dapat berdampak baik pada perekonomian nasional. Meskipun inisiatif ini sudah diluncurkan dan menunjukkan peningkatan volume transaksi awal, masih ada kekurangan informasi yang perlu disempurnakan.

Dalam konteks penerapan, penelitian ini berfokus pada Kepulauan Riau terkhusus kabupaten Bintan. Bintan adalah pulau terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan bagian penting dari sektor pariwisata di provinsi tersebut. Pulau ini terkenal dengan resor-resor mewahnya, lapangan golf kelas dunia, serta objek wisata pesisirnya yang menakjubkan. Sektor ini mulai berkembang pada awal tahun 1990-an seiring dengan pembangunan Bintan Resorts di Lagoi, di pesisir utara Pulau Bintan. Proyek ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Kawasan resor wisata ini mencakup lahan seluas 23.000 hektar dan dikelola oleh PT Bintan Resorts Cakrawala, sebuah anak perusahaan operasional dari Bintan Resorts International Pte Ltd. Kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari Gallant Venture Ltd, sebuah perusahaan induk investasi yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. (Muzwardi & Negara, Dharma, 2021)

Tak hanya itu, penentuan lokasi di Kabupaten Bintan Karena terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi paling strategis di Indonesia. Area

ini menjadi pusat perdagangan internasional karena berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN. (Hanafi et al., 2025)

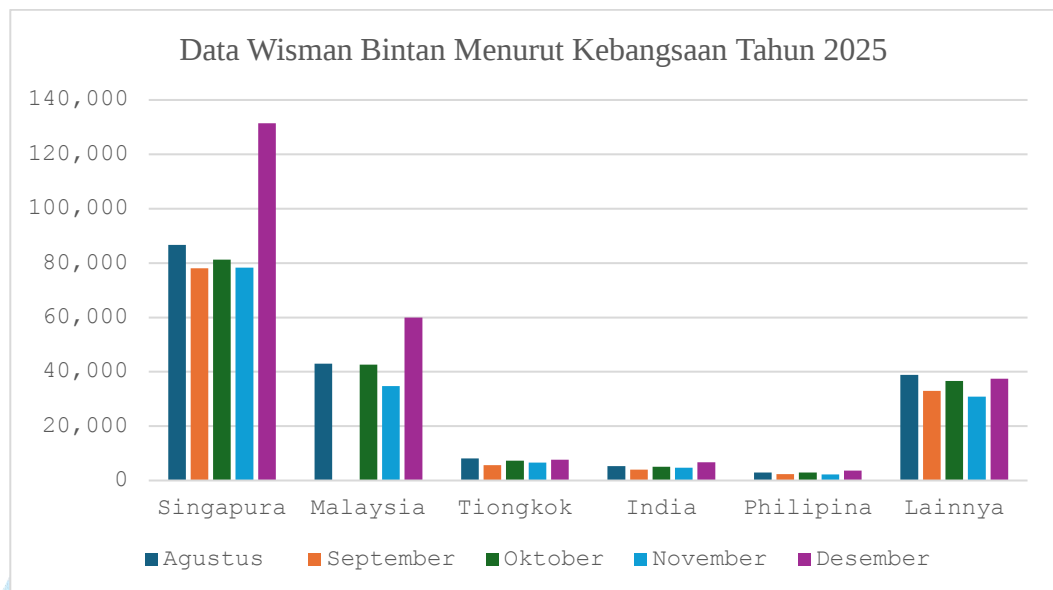
Gambar 1.1 Peta Kepulauan Riau



Sumber : Website Google

Terlihat pada grafik, dilansir dari website resmi Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Singapura dan Malaysia merupakan dua negara teratas dengan kunjungan wisatawan tertinggi tahun 2025 dengan jumlah wisatawan Singapura Sebanyak 131.482 per Desember 2025 dan Wisatawan Malaysia yang berada di peringkat 2 sebanyak 59.989 per Desember 2025. Karena lokasinya yang strategis, Kepulauan Riau merupakan lokasi yang ideal untuk mencoba menerapkan ekonomi digital, terutama dalam hal sistem pembayaran internasional.

Gambar 1.2 Grafik Daftar Wisman Menurut Kebangsaan

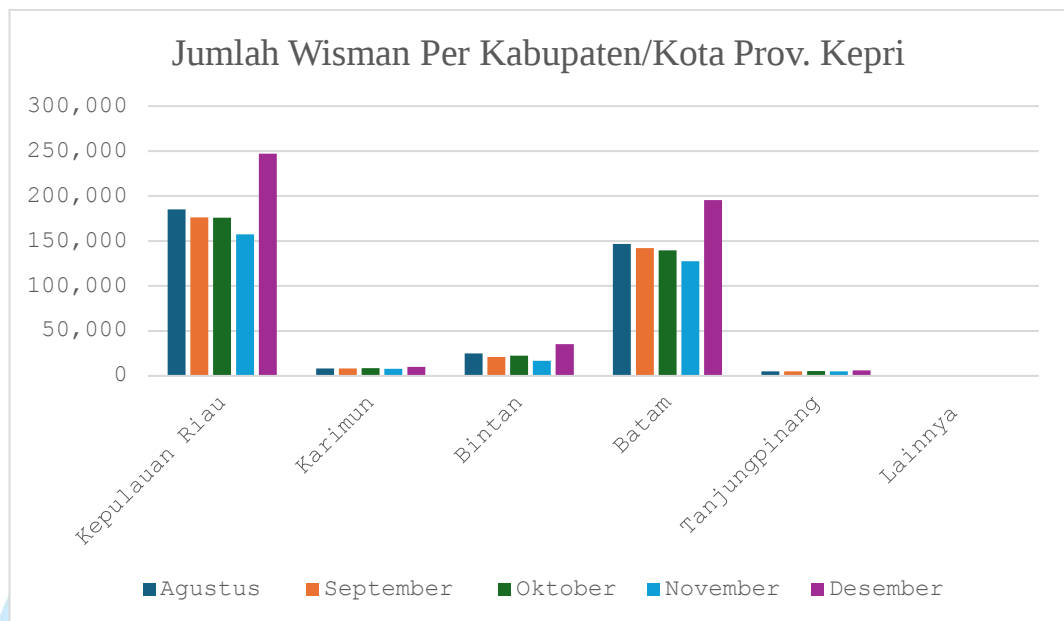


Sumber : Website Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau

Selain dari faktor lokasi geografis, Kepulauan Riau memiliki pusat ekonomi yang dinamis, terkhusus di kabupaten Bintan, yang terkenal sebagai pusat pariwisata internasional di Kepulauan Riau. Kebutuhan akan sistem pembayaran elektronik lintas negara akan semakin meningkat karena Bintan menjadi tempat wisata populer bagi turis asing, terutama dari Singapura dan Malaysia. Jika *QRIS Cross Border payment* tersedia di daerah tersebut, transaksi wisatawan akan lebih mudah, bisnis kecil dan menengah lokal akan lebih kompetitif, dan integrasi ekonomi regional akan lebih kuat. Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia telah mendukung program *ASEAN Payment Connectivity*, yang bertujuan untuk menghubungkan sistem pembayaran di Asia Tenggara.

Volume wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau yang semakin tinggi terlihat pada diagram batang yang menunjukkan Kabupaten Bintan menjadi kabupaten tertinggi kedua setelah pulau Batam dengan total 253.366 wisatawan.

Gambar 1.3 Jumlah Wisman Per Kab/Kota 2025



Sumber : Website Badan Pusat Statistik 2025

hal ini menjadi peluang besar bagi perekonomian serta sektor pariwisata yang ada di kepulauan Riau terutama kabupaten Bintan. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara serta memudahkan proses transaksi jual beli, maka dibutuhkan sistem pembayaran yang cepat dan mudah.

Penelitian yang ada sebagian besar fokus pada kebijakan makro dan kedaulatan digital. Sementara itu, riset yang mendalam mengenai efektivitas penerapan di tingkat lapangan, terutama di daerah perbatasan seperti Kepri, masih sangat terbatas. Implikasi pembayaran lintas batas di Kepri khususnya di Kabupaten Bintan perlu di analisis lebih lanjut untuk mengetahui kekurangan yang dapat diperbaiki demi meningkatkan kualitas penggunaan secara menyeluruh.

Analisis ini tidak hanya terbatas pada data jumlah transaksi, tetapi juga mencakup analisis kualitatif mengenai tingkat penggunaan sistem oleh pengusaha

lokal, tantangan mereka terkait pemahaman digital dan infrastruktur, serta persepsi pengguna terhadap kemudahan, kecepatan, dan keandalan sistem. Analisis ini sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan ini benar-benar memberikan dampak yang optimal kepada ekonomi lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi penggunaan QRIS Cross Border oleh wisatawan Asing di sektor pariwisata Kab. Bintan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melakukan Studi Kasus Implikasi Cross Border Payment sebagai jembatan perdagangan lintas batas negara di Daerah Kabupaten Bintan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi diplomasi ekonomi digital Indonesia melalui penerapan *QRIS Cross Border* oleh wisatawan mancanegara yang memasuki wilayah wisata Kabupaten Bintan. Analisis ini mengukur bagaimana sistem ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama keberhasilan atau hambatan di wilayah perbatasan. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan strategis bagi Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam memperbaiki kebijakan digitalisasi pembayaran di daerah perbatasan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu Hubungan Internasional, khususnya sub kajian Diplomasi Digital dan Ekonomi Politik Internasional. Selain itu, penelitian ini akan membantu memperluas literatur tentang bagaimana instrumen teknologi finansial (*FinTech*) dapat menjadi alat diplomasi ekonomi yang berguna untuk memperkuat integrasi ekonomi regional. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin menyelidiki masalah digitalisasi sistem pembayaran dalam konteks kerja sama lintas batas (*cross-border payment*) dan kedaulatan digital di era industri 4.0.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, diantaranya yaitu :

a. Untuk Pemerintah dan Otoritas Moneter (Bank Indonesia)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan QRIS Cross Border di daerah perbatasan. Penelitian ini memberikan informasi nyata tentang hambatan yang dihadapi di lapangan, sehingga kebijakan diplomasi ekonomi digital di masa depan dapat lebih tepat sasaran, terutama dalam memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN.

b. Untuk Pelaku Usaha dan UMKM di Pulau Bintan

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai manfaat dan potensi menggunakan QRIS Cross Border sebagai sarana untuk mengakses

pasar wisatawan dari luar negeri secara lebih luas, aman, dan efisien. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong pelaku usaha lokal di kawasan wisata dan sekitarnya di wilayah Kabupaten Bintan untuk lebih cepat beradaptasi dengan teknologi pembayaran digital guna meningkatkan daya saing ekonomi mereka.

c. Untuk Masyarakat dan Wisatawan

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kemudahan bertransaksi lintas batas yang diberikan pemerintah Indonesia. Hal ini berdampak pada terbentuknya ekosistem pariwisata yang lebih modern dan inklusif di Kabupaten Bintan, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, serta meningkatkan nama pariwisata Kabupaten Bintan di mata Internasional.

